

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan secara sederhana dipahami sebagai tindakan, sikap. Dan pernyataan dari pemerintah menyangkut beberapa tujuan utama dalam bentuk beberapa program dan kegiatan yang mana dilaksanakan oleh agensi atau badan di suatu pemerintahan untuk merespon kondisi sosial masyarakat dalam konteks lokasi dan waktu yang telah ditentukan.⁵⁶ Istilah kebijakan kadangkala dimaknai sebagai suatu usulan khusus, disampaikan oleh pihak eksternal organisasi pemerintahan yang dapat berupa organisasi kemasyarakatan dan politik ataupun yang secara langsung diajukan oleh internal dari pemerintah sendiri.⁵⁷

Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Sementara itu Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.⁵⁸ Agar mudah dipahami definisi kebijakan publik memiliki beberapa konsep kunci yang

⁵⁶ Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 20.

⁵⁷ Ibid, hlm: 21.

⁵⁸ Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: ALFABETA Bandung. Hlm: 44.

terdapat pada suatu *publik policy* tersebut yaitu meliputi beberapa aspek berikut ini.⁵⁹

- a. Perbuatan organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang. Kebijakan merupakan perbuatan atau langkah yang dilaksanakan organisasi pemerintahan yang legal secara politik dan memiliki dukungan anggaran.
- b. Kebijakan merupakan respon akan kondisi, situasi, dan permasalahan masyarakat yang konkrit. Sehingga menjadi langkah dalam penyediaan layanan publik.
- c. Kumpulan perbuatan atau sikap yang bertujuan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa aspek tindakan dan kesepakatan yang telah disahkan oleh pemerintahan sehingga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kebijakan merupakan apa yang diputuskan dan untuk diimplementasikan. Selain itu, kebijakan juga bersifat akan adanya kolektivitas stakeholder dalam perumusan dan pelaksanaannya. Karena permasalahan masyarakat yang kompleks menuntut adanya kebijakan sebagai *problem solving* yang strategis dan berdampak positif bagi masyarakat.
- e. Kebijakan merupakan justifikasi dari satu aktor tunggal atau beberapa figur stakeholder. Kebijakan tersebut memuat *statement* pemerintah akan tindakan-tindakan atau perencanaan yang

⁵⁹Ibid, hlm: 44-45.

sebelumnya sudah dicanangkan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berbeda dengan Eystone (1971: 18) yang menyatakan secara sederhana terkait *public policy* sebagai “*the relationship of governmental unit to its environment*”.⁶⁰ Dengan kata lain kebijakan menunjukkan adanya relasi antar bagian dalam organisasi pemerintah. Sementara itu, definisi lain yakni yang disampaikan oleh Wilson bahwa kebijakan merupakan beberapa tindakan, tujuan, dan pernyataan dari organisasi pemerintahan menyangkut permasalahan, dan respon organisasi pemerintahan dalam pemecahan permasalahan tersebut yang nantinya akan dilaksanakan atau tidak serta gambaran mengenai dampaknya terhadap masyarakat nantinya.⁶¹ Pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan bersifat kompleks tidak hanya merupakan keputusan dari pemerintah, melainkan harus berorientasi pada pencapaian tujuan, pemecahan masalah sosial, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Lebih rinci Dewey (1927) menjelaskan bahwa Kebijakan Publik menitik-beratkan pada publik dan problem-problemnnya, kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun

⁶⁰ Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 13.

⁶¹Ibid.

(*constructed*) dan didefinisikan serta bagaimana ke semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.⁶²

Segala bentuk keputusan umum yang memuat beberapa pandangan menyangkut tindakan dari organisasi pemerintah dan dampak dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan kedepannya. Beberapa pandangan tersebut dalam praktiknya memang tidak begitu dikemukakan langsung. Akan tetapi apabila kita cermati, suatu kebijakan utamanya mencakup konseptual dan bersifat teoritis sehingga nampak adanya relasi dari permasalahan kebijakan dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.⁶³

Berbagai tinjauan tentang kebijakan sebagai pemilihan kewenangan (*Authoritative Choice*), yaitu respons pemilik kewenangan terhadap issue atau problem publik. Oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya mencerminkan berbagai hal sebagai berikut:⁶⁴

1. Bertujuan: kebijakan publik bermakna pencarian terhadap tujuan pemerintah yang spesifik melalui aplikasi sumberdaya publik mnaupun private yang teridentifikasi.
2. Berkaitan dengan pembuatan keputusan dan menguji coba konsekuensinya.
3. Terstruktur dengan aktor yang dapat diidentifikasi dan tahapan sequential yang dapat ditemukenali.

⁶² Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hlm: 8.

⁶³Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 32.

⁶⁴Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hlm: 9.

4. Pada hakikatnya adalah politis, mengekspresikan hasil pemilihan dan prioritas program eksekutif.

B. Analisis Proses Kebijakan

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Menurut Dye (2005, 31) bagaimana sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem politik.⁶⁵

Analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik (*public policy process*). Tujuan pokok melakukan analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) adalah untuk meramu secara sistematis beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin misalnya sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi sosial dan antropologi, yang kemudian digunakan untuk menginterpretasikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan pemerintah.⁶⁶

J. K Friend dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa “*policy is essentially a stance which, once articulated, contributes to the context within*

⁶⁵ Satiningrum, Nalora. 2019. *Kebijakan Publik Sebagai Proses*. https://www.academia.edu/10127759/Kebijakan_Publik_Sebagai_Proses diakses pada 29 September 2019.

⁶⁶ Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 39.

which a succession of future decision will be made” (1974,hal. 40). (Kebijakan pada hakekatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang sekali dinyatakan, akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat).⁶⁷

Dalam proses kegiatan analisis kebijakan publik, Parsons (2005: 30) menjelaskan ada 6 tahapan, yakni: (1) Mendefinisikan problem. (2) Menetapkan agenda, (3) Merumuskan kebijakan, (4) Mengambil keputusan, (5) Mengimplementasikan kebijakan, dan (6) Mengevaluasi kebijakan.⁶⁸

Tahapan pertama yaitu mendefinisikan problem yang mana hal ini merujuk pada pengidentifikasian masalah kebijakan publik. Permasalahan yang telah ditetapkan dalam analisis kebijakan perlu didefinisikan agar tidak keluar dari konteksnya. Dalam mendefinisikan masalah kebijakan publik pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah publik, dan kemudian menetapkan satu masalah publik yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Dalam pemilihan permasalahan publik didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual yang sedang dihadapi dan merupakan masalah penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, masalah tersebut mempunyai dampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan publik (permasalahan sejalan dengan transformasi publik yang sedang bergerak di

⁶⁷ Ibid, hlm: 40.

⁶⁸Tia, Chintia. 2019. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.
https://www.academia.edu/6526200/Review_wayne_parson diakses pada 12 Mei 2019.

masyarakat, misalnya penguatan demokratis, hak asasi manusia atau *transparence* dan *good governance*).⁶⁹

Menetapkan agenda merupakan tahapan kedua dari siklus analisis kebijakan publik. Menetapkan agenda bisa disebut juga dengan penyusunan agenda karena permasalahan yang dapat terlihat secara fisik biasanya berupa daftar butir-butir persoalan yang karena kepentingannya oleh pejabat pemerintah dianggap perlu mendapat perhatian serius. Misalnya terdapat sebuah permasalahan yang terjadi di perkotaan yang kemudian oleh Pemerintah Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibahas secara serius dalam sebuah rapat yang kemudian hal tersebut karena kepentingannya disebut sebagai agenda publik (*public agenda*). Proses penyusunan agenda pada dasarnya merupakan persoalan politik dan karena itu kental dengan muatan politik, itulah sebabnya beberapa persoalan tertentu karena alasan tertentu bisa jadi tidak pernah menjadi agenda publik, sementara yang lainnya dengan begitu mudah menyedot perhatian dan segera ditindaklanjuti atau setidaknya mendapat giliran diperhatikan di saat-saat terakhir.⁷⁰

Tahap ketiga yaitu perumusan kebijakan (*policy formulation*), bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan sebuah permasalahan⁷¹ atau kadang disebut adopsi kebijakan (*policy adoption*) yakni menjelaskan tentang proses pengesahan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi atau mengurangi

⁶⁹Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hlm: 72.

⁷⁰Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 34-35.

⁷¹Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hlm: 15

masalah yang terjadi di masa lalu atau untuk mencegah terjadinya kembali masalah kebijakan publik yang kurang lebih sama di masa yang akan datang.⁷²

Mengambil keputusan sebagai tahap keempat dari siklus analisis kebijakan publik, dimana pada tahap ini pengambilan keputusan (*decision making*) dari pembuatan kebijakan merupakan penjelasan dari proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Artinya bagaimana suatu alternatif dapat ditetapkan, kemudian adanya persyaratan/kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan dan bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan kemudian menetapkan secara jelas apa isi dari kebijakan yang telah diputuskan.⁷³

Tahap kelima dalam siklus analisis kebijakan publik ialah yang disebut implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.⁷⁴ Implementasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses, suatu output (keluaran), atau suatu hasil akhir (*outcome*). Dilihat sebagai proses, implementasi akan mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki. Konsep *output*/keluaran implementasi mengacu pada cara-cara atau sarana yang telah dipakai untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diprogramkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil akhir implementasi ialah terjadinya

⁷²Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 35.

⁷³Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hlm: 15-16.

⁷⁴Ibid, hlm: 16.

perubahan-perubahan tertentu pada permasalahan sosial dalam skala luas yang ingin diatasi oleh suatu program. Nampak pada hakikatnya bahwa makna implementasi merupakan tahap yang amat penting dalam siklus kebijakan. Implementasi sering dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang berlangsung sesudah sebuah rancangan undang-undang disahkan sebagai undang-undang.⁷⁵

Tahap terakhir yaitu mengevaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.⁷⁶ Evaluasi kebijakan pada hakikatnya mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau apa yang terjadi sesudah kebijakan tertentu diimplementasikan. Dengan begitu evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses legislasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu senyatanya mencapai hasil-hasil yang diinginkan.⁷⁷ Mengevaluasi kebijakan dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan, mengevaluasi kebijakan berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial sebagai sebuah langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik. Dengan adanya evaluasi, menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan publik yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beroperasi tersebut yang harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Jika kebijakan yang ada dipandang

⁷⁵Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 36.

⁷⁶Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hlm: 16.

⁷⁷Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm: 37.

tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula.⁷⁸

C. Analisis Proses Kesiapan Terhadap Unsur *Smart City*

Kajian terhadap *smart city* tentunya memiliki banyak langkah, terlebih kesiapan pada kota yang akan menuju *smart city* yakni mempersiapkan kota tersebut menuju kota cerdas sesuai dengan latar belakang yang dimiliki. Unsur-unsur yang dapat dianalisis terhadap proses kesiapannya yaitu pada kesiapan infrastruktur, suprastruktur, SDM, regulasi dan *branding*.

Proses kesiapan Kota Palangkaraya menuju *smart city* ini telah berada pada fase keempat yaitu pengambilan keputusan (*decision making*). Pada fase ini Pemerintah Kota Palangkaraya telah memilih untuk melakukan suatu tindakan dalam mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju *smart city*. Terdapat beberapa komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan *smart city* tersebut, artinya pemerintah melakukan beberapa hal dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kota Palangkaraya saat ini sebagai bentuk langkah awal untuk memulai mempersiapkan kota, adapun beberapa hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. Infrastruktur

Infrastruktur sebagai elemen utama dalam proses persiapan *smart city*, hal ini dikarenakan infrastruktur sebagai pondasi yang paling vital dalam keberlangsungan segala proses persiapan kota menuju *smart city*. Baik dari infrastruktur fisik, seperti jembatan, gorong-gorong, dan jalan sebagai penghubung atau mobilitas dari aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya,

⁷⁸Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: ALFABETA Bandung. Hlm: 111-113.

dalam mengatasi masalah ini Pemerintah Kota Palangkaraya menunjuk dinas terkait agar bisa melaksanakan perbaikan jalan yang berfokus pada perbaikan jalan dalam Kota Palangkaraya, kemudian adanya peremajaan dan penambahan-penambahan jalan baru yang menghubungkan kecamatan yang terisolasi (tidak ada jalan darat).

Infrastruktur yang kedua yang menjadi perhatian pemerintah yaitu infrastruktur digital, dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Palangkaraya menunjuk Diskominfo sebagai *lead project* dari salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan IT sebagai program unggulan agar terwujudnya *Smart City* Kota Palangkaraya.

2. Suprastruktur

Suprastruktur yang dimaksudkan disini adalah Pemerintah Kota Palangkaraya telah melakukan beberapa kerjasama yang mana terkait dengan persiapan Kota Palangkaraya menuju *smart city*, hal ini terlihat dari kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya yaitu Universitas Palangkaraya. Kerjasama yang dilakukan yaitu pertama pembuatan rencana induk atau dikenal dengan *Master Plan* TIK Kota Palangkaraya, yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Palangkaraya. Kedua yaitu Kajian Konsep Pengembangan *Smart City* Berbasis Kearifan Lokal yang dilakukan kerjasama dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Palangkaraya.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam terwujudnya *smart city*. Analisis sumber daya manusia terhadap kesiapan

kota menuju *smart city* dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama Sumber Daya Manusia (masyarakat) dan Sumber Daya Pemerintahan.

Analisis SDM (masyarakat) mengacu kepada kapasitas masyarakat kota, melihat bagaimana kesiapan masyarakat dalam menerima konsep *smart city*. Bagaimana masyarakat dapat menyadari bahwa masa depan kota dipengaruhi oleh perkembangan global yang berupa perkembangan teknologi telekomunikasi dunia. Masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar tau, tetapi juga mampu mensosialisasikan *smart city* kepada lingkungannya.⁷⁹

Analisis SDM yang kedua yakni pada Sumber Daya Pemerintahan, dimana analisis akan dilakukan pada sumber daya pemerintahan yakni melihat kesiapan pegawai pemerintah daerah untuk melaksanakan program *smart city* yang memberikan pelayanan publik secara terintegritas dan interoperabilitas. Menjadi poin penting pemerintah daerah harus mampu terus bertumbuh dan berkembang dengan memenuhi peningkatan kebutuhan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik berbasis internet dan teknologi, terlebih memiliki operator data center yang melakukan backup data dan aplikasi secara berkala.⁸⁰

4. Regulasi

Analisis yang dilakukan pada unsur regulasi terhadap kesiapan kota menuju *smart city* merupakan suatu langkah penting terhadap pembentukan *grand desain* yakni payung hukum sebagai pedoman berjalannya suatu

⁷⁹Masterplan Smart City Kota Bogor. 2017. Hlm: 57.

<https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-1.-analisis-strategis-smart-city-kota-bogor.pdf> diakses pada 14 Oktober 2019.

⁸⁰Ibid, hlm: 58-59.

kebijakan yang telah dirumuskan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat (2) menyebutkan Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian dijelaskan secara rinci pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi Daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Artinya analisis terhadap regulasi yang ada di daerah (khususnya kota) dapat dilihat pada proses Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mana melihat sejauhmana tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten/Kota yang dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.⁸¹ Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, yang memuat:

- a. Judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Materi yang diatur;
- c. Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5. **Branding**

Analisis branding merupakan tahapan akhir pada analisis terhadap unsur *smart city*. Konsep branding daerah atau *city branding* difokuskan pada

⁸¹<https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada 14 Oktober 2019.

peningkatan *brand value* daerah yang dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸²

Adapun analisis branding dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut⁸³:

- a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*).
- b. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*).
- c. Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*).

D. Smart City

Konsep mengenai *smart city* atau kota cerdas dalam praktiknya merupakan penerapan di wilayah perkotaan dan telah menjadi perbincangan global. Hal ini dikarenakan konsep kota cerdas menawarkan tema yang menarik dimana diterapkannya teknologi dan informasi serta komunikasi yang mengelola kehidupan masyarakat. Akan tetapi, penerapan kota cerdas tidak akan berjalan lancar apabila tidak didukung dengan keterlibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat yang memiliki respon positif dan kompetensi penggunaan teknologi yang unggul akan sangat pemerintah dalam pelaksanaan kota cerdas. Dengan kata lain adanya hubungan antara kedua pihak (pemerintah dan masyarakat) dalam proses pelaksanaan kota

⁸² *Masterplan Smart City Kota Bogor*. 2017. Hlm: 77.

<https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-1.-analisis-strategis-smart-city-kota-bogor.pdf> diakses pada 14 Oktober 2019

⁸³ *Ibid.*

cerdas akan membuat kota tersebut sebagai daerah atau daerah yang memiliki aspek kenyamanan untuk dijadikan tempat tinggal dan dapat menjadi sebuah respon akan adanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis.⁸⁴

Lebih lanjut secara spesifik Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) menjelaskan secara terpisah arti dari *smart city* (kota cerdas) adalah dalam konteks perencanaan kota tersebut dan menyangkut kesiapan teknologi yang digunakan.⁸⁵ Pada aspek perencanaan, dapat disebut sebagai kota cerdas apabila memiliki beberapa aspek yang meliputi prioritas dan kebijakan yang strategis. Dengan kata lain konsep kota cerdas tidak begitu saja dimunculkan dan dilaksanakan, melainkan sebelumnya harus didukung dengan perencanaan strategis yang matang. Aspek kedua yakni teknologi sebagai aspek utama dalam pelaksanaan kota cerdas yang memang berusaha menghadirkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penerapan kota cerdas yang berbasis teknologi akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam penyelesaian masalah, karena kemunculan masalah dapat diketahui melalui teknologi sehingga ada respon yang spontan dan cepat dari pemerintah dalam penanganan probel tersebut.

Sementara itu pendapat lain disampaikan oleh Caragliu dkk yang menyatakan bahwa kehadiran kota cerdas merupakan sebuah investasi dalam konteks pengembangan berbagai sumber daya perkotaan, baik sumber daya manusia, masyarakat secara umum, sarana dan prasarana kota, serta

⁸⁴ROAD MAP KOTA YOGYAKARTA MENUJU SMART CITY. Tim PSPPR UGM. 2016. Hlm: 1.
https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf diakses pada 05 Maret 2018.

⁸⁵Ibid, hlm: 1-2.

mendukung adanya pengembangan ekonomi secara *sustainable* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan didukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸⁶ Lebih lanjut, Sudaryono (2014) menjelaskan bahwa penerapan kota cerdas merupakan langkah baru untuk mengatasi permasalahan di kota tersebut dan menjadi kunci sukses pembangunan kota. Karena aspek utama dari penerapan kota cerdas yakni adanya penyediaan layanan publik berbasis TIK yang modern dan mampu memperbaiki efektivitas dan efisiensi dari kualitas layanan publik di kota tersebut.⁸⁷

1. Konsep *Smart City*

Penerapan kota cerdas pada umumnya merupakan konsepsi tata kelola perkotaan yang berkembang di banyak belahan dunia, terutama di negara-negara maju. Penerapan kota cerdas dalam perkembangannya sangat didukung dan ditunjang dengan kehadiran dari internet. Karena melalui teknologi tersebut masyarakat akan sangat mudah untuk memperoleh akses informasi dan pengetahuan tertentu, khususnya yang berasal dari organisasi pemerintahan. Akan tetapi dalam perkembangan awalnya, praktik tersebut masih dalam bentuk komunikasi satu arah, meskipun patut diakui apabila hal tersebut merupakan permulaan dari penerapan kota cerdas.⁸⁸

Lebih lanjut, penerapan kota cerdas mengalami pengembangan di tahun sekitar awal tahun 2000, karena kemajuan penemuan di bidang teknologi

⁸⁶Ibid.

⁸⁷ Insani, Priskadini April. 2017. *Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City*. PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 2, Nomor 1. Hlm: 27.

⁸⁸ROAD MAP KOTA YOGYAKARTA MENUJU SMART CITY. Tim PSPPR UGM. 2016. Hlm: 3.
https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf diakses pada 05 Maret 2018.

informasi. Sesuai yang sebelumnya tidak dapat dilakukan, menjadi dapat dilakukan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah berbasis kota cerdas. Karena komunikasi dan layanan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga dapat berupa dua arah secara langsung karena mendapat dukungan dari infrastruktur yang semakin memadai membuat informasi dari pemerintah kota menjadi semakin interaktif.⁸⁹ Baru pada pertengahan tahun 2000, konsep kota cerdas mulai mengalami kepesatan dalam perkembangan. Karena pada periode tersebut muncul kegunaan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui *social networ* dan jejaring dunia maya serta kegunaan lainnya yang dapat menjadi langkah adanya pemberdayaan warga perkotaan melalui penerapan *smart city* tersebut.⁹⁰

Di lain sisi, penjelasan yang lebih kompleks oleh Nam dan Pardo yang menyatakan terkait dua aspek utama dalam pengembangan kota cerdas yang terdiri atas aspek teknologi dan manusia. Pandangan ini menuntut pemerintah untuk benar-benar menyiapkan infrastruktur teknologi yang tepat guna dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang penggunaan teknologi dan informasi. Pendapat inilah yang dominan digunakan para pemimpin organisasi pemeritahan dan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan kota cerdas.⁹¹

Smart city merupakan agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antar manusia, ruang binaan, dan ruang alami yang lebih harmonis. *Smart city* adalah konsep

⁸⁹Ibid.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ibid, hlm: 4.

menyajikan informasi keadaan suatu kota secara komprehensif dan *real time*. Informasi tersebut dapat diakses melalui *controlling room*. Penerapan kota cerdas membutuhkan kajian dan perencanaan yang matang dan strategis yang di dalamnya juga menggunakan aspek TIK secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat cohen, “*Smart cities use information and communication technologies to be more intellegent and efficient in the use of resources, resulting in cost and energy savings, improved service delivery and quality of life, and reduced environmental footprint-all supporting innovation and the low-carbon economy.*”⁹²

Pelaksanaan pengembangan kota cerdas merupakan langkah dan upaya demi tercapainya *sustainable development* yang didalamnya memuat peningkatan penyediaan pelayanan publik dan menkaitkannya dengan komponen-komponen kebutuhan perkotaan lainnya seperti bidang manajemen pemerintahan, permukiman, lingkungan hidup, ekonomi, sdm, dan transportasi publik.⁹³

2. Dimensi Smart City

Cohen menyebutkan bahwa konsep kota cerdas atau smart city memiliki beberapa dimensi yakni smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living dan smart governance.

⁹²Insani, Priskadini April. 2017. *Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City*. PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 2, Nomor 1. Hlm: 27.

⁹³ROAD MAP KOTA YOGYAKARTA MENUJU SMART CITY. Tim PSPPR UGM. 2016. Hlm: 5.
https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf diakses pada 05 Maret 2018.

Cohen (2012) membagi *smart city* menjadi 6 dimensi, yaitu: *smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart governance*.⁹⁴

Dimensi ekonomi dalam kota cerdas dapat dipahami bahwa kota cerdas harus ditunjang dengan infrastruktur perekonomian yang unggul. Selain itu, pengembangan kota cerdas juga akan berdampak pada pembangunan perekonomian di kota tersebut. Maka dari itu, kota cerdas harus memuat inovasi dan kerativitas dalam dunia jasa, industri baik kecil, menengah maupun besar, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya.⁹⁵

Dalam konteks dimensi *mobility*, pelaksanaan kota cerdas harus ditunjang dengan keberadaan pelayanan transportasi yang modern dan terintegrasi antar jenis transportasi. Hal ini harus pula didukung dengan adanya sistem kartu transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat di tiap transportasi publik yang saling terkoneksi. Sehingga menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dibandingkan penggunaan transportasi pribadi.

Kota cerdas juga memiliki lingkungan yang cerdas dimana pengelolaan limbah berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memanfaatkannya untuk keperluan daur ulang. Sebagian kota-kota di Indonesia telah berhasil mendaurulang sampah padatnya, namun hanya sekitar 15% dari volume sampah yang ada, dan sebagian besar dibantu oleh sektor informal seperti pemulung, pengumpul dan pengepul.⁹⁶

⁹⁴Ibid, hlm: 2.

⁹⁵Nurmandi, Ahmad. 2014. "*Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*". Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY). Hal: 401.

⁹⁶Ibid.

Sementara aspek lingkungan hidup yakni menyangkut pelaksanaan pengelolaan sampah yang terpadu baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak dunia usaha. Karena apabila kota tersebut memiliki kemampuan yang buruh dalam pengelolaan sampah, maka akan menjadi tidak nyaman untuk menjadi tempat tinggal bagi masyarakat. Pengelolaan sampah terpadu harus didukung penggunaan teknologi persampahaan yang modern dan terintegrasi mulai dari rumah tangga, pengumpul sampah, hingga tempat pembuangan akhir (TPA).⁹⁷

Dalam dimensi *smart people*, kota cerdas harus didukung dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi dalam hal penggunaan teknologi dan informasi. Tidak hanya itu, aspek ini juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik pula. Kota cerdas memiliki tatakelola cerdas yang mencakup unsur-unsur partisipasi di dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah kota harus memiliki *e-government* yang baik, yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan dunia swasta. Informasi dari masyarakat selanjutnya tersedia pada situs-situs pemerintahan yang juga digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan.⁹⁸

Smart government mengacu pada prinsip *Good Governance*, kunci utama pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan adalah tidak hanya pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi juga peningkatan profesionalisme

⁹⁷Ibid, hlm: 403.

⁹⁸Ibid, hlm: 405.

kinerja aparatur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh kecanggihan teknologi.⁹⁹

Kota cerdas memberikan kualitas kehidupan yang layak untuk penduduknya.¹⁰⁰ Sehingga terwujud masyarakat yang aman dan bahagi untuk tinggal di kota tersebut. Komponen smart living dapat dilihat melalui: (1) Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, (2) Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, (3) Pengembangan peran media, (4) Kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.¹⁰¹



⁹⁹Insani, Priskadini April. 2017. *Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City*. PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 2, Nomor 1. Hlm: 30.

¹⁰⁰Ibid, hlm: 30-31.

¹⁰¹ Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Komponen Smart City di Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan" (dalam jurnal Utomo, Chandra Eko Wahyudi & Hariadi, Mochamad. 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota*. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol. 4, No. 2. Hlm: 163).

E. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL JURNAL	TEORI	HASIL
1	Siti Widharetno Mursalim	Implementasi Kebijakan <i>Smart City</i> di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Bardach yang dikutip oleh Agustino (2006:138) dalam buku “Dasar-dasar Kebijakan Publik” - Mufizz yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam buku “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” - Model implementasi kebijakan George C. Edward III. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam implemetasi kebijakan <i>smart city</i> yang diterapkan di Kota Bandung ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. - Sosialisasi mengenai <i>Smart City</i> belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai <i>Smart City</i> dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada <i>Roadmap</i> Walikota Bandung.
2	Chandra Eko Wahyudi Utomo & Mochammad Hariadi	Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Mark Deakin (2013-08-22) “<i>From intelligent to smart cities</i>”. - Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara menyeluruh konsep <i>smart city</i> memiliki 6 karakteristik, yaitu <i>smart governance, smart economy, smart mobility, smart environtment, smart people, dan smart living</i> yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Masing-masing kota melakukan fokus berbeda dalam membangun kotanya menjadi kota yang pintar. - Strategi dalam pembangunan <i>smart city</i> ditempuh menyesuaikan

			<p>Pembangunan Nasional tentang Komponen <i>Smart City</i> di Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan dari</p>	<p>dengan segala potensi yang dimiliki dan keadaan serta kondisi di daerah masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tantangan diterapkannya <i>smart city</i> di suatu daerah antara lain: ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang sangat besar, infrastruktur IT, adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi.
3	Priskandini April Insani	Mewujudkan Kota Responsif Melalui <i>Smart City</i>	<p>Agus Dwiyanto (2006) “Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahmad Lintang Lazuardi (2015) “Manajemen Strategis Inovasi dan Teknologi, terjemahan dari <i>Strategic Management of Technological Innovation, by Mellisssa A. Schilling</i> (2013)”. - M. Quadrat Nugraha (2014) “Manajemen Strategis Pemerintahan”. - Stephen Goldsmith (2014) “Konsep <i>Smart City</i>”. 	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan konsepsi kota cerdas yang memiliki tujuan menyediakan pelayanan publik yang mudah dan didukung dengan penerapan aspek TIK yang optimal dan tepat guna. - <i>Smart city</i> harus mampu membuat masyarakatnya aktif dalam beraktivitas, melakukannya dengan tenang, aman, nyaman, senang dan bahagia tinggal didalamnya. - Pada dasarnya konsep <i>smart city</i> di seluruh dunia memiliki kesamaan yakni mengandalkan teknologi sebagai pokok dasar dalam pelaksanaannya, namun yang membedakan adalah strategi dan pengaplikasian yang dilakukan oleh pemerintah berbeda di setiap negara yang mana disesuaikan dengan kondisi negara tersebut.

			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Departement for Business Innovation & Skills (2013)</i> “5 aspek pendekatan dalam membangun kota impian masa depan”. 	
4	Tim PSPPR (Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional) UGM	ROAD MAP Kota Yogyakarta Menuju <i>Smart City</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Cohen (2012) “<i>Smart City Indicator</i>”. - Deakin & Allwinkle (Allwinkle & Cruickshank, 2007) “Tahapan Perkembangan Teknologi Digital dalam Perkembangan Kota”. - Nam & Pardo (2011) “Faktor Berkembangnya <i>Smart City</i>”. - Griffinger, dkk (2007) “Dimensi <i>Smart City</i>” 	<p>Aspek-aspek yang ditekankan agar terwujudnya penerapan smart city di Yogyakarta:</p> <p>a. Branding <i>Smart City</i> Melakukan city branding, sebagai strategi atau proses pengembangan kota dalam berbagai bentuk media promosi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Branding dalam konteks Kota Cerdas Yogyakarta diperlukan untuk bersosialisasi dan meningkatkan motivasi untuk sukses di kota pintar, atau sekadar sebagai semangat dan tindakanbersama.</p> <p>b. Penyelarasan Kebijakan dan Strategi Yogyakarta <i>Smart City</i> Penyesuaian dicapai melalui sinergi, harmoni, dan sinkronisasi kebijakan kota Yogyakarta. Merancang kebijakan dan strategi Kota Cerdas Yogyakarta dapat didahului dengan persiapan Peta Jalan Kota Cerdas yang kemudian dimasukkan ke dalam fase ketiga RPJMD Kota Yogyakarta yang akan disiapkan sehingga dapat ditampung dalam penyusunan Rencana Kota Yogyakarta dan Rencana Strategis SKPD.</p>

				<p>c. Penataan Unsur Yogyakarta Smart City Penataan unsur kota cerdas mencakup aspek intitusional, jaringan , dan sumberdaya. Penataan isntitusional harus mempertimbangkan organisasi, regulasi, maupun norma/etika/budaya. Penataan jaringan dilaksanaka dengan adanya koorinasi dan sinrgitas antar stakeholder yang meliputi perguruan tinggi, sektor bisnis, komunitas masyarakat, pemerintahan, dan media. Penataan sumberdaya dilakukan melalui penataan <i>brainware,software, dan hardware</i>.</p> <p>d. Pembangunan dan Pengembangan Yogyakarta Smart City Pengembangan penerapan kota ceras di Yogyakarta atas dasar komitmen yang tinggi dan bersifat kolektif antar stakeholder.</p>
5	Nasrin Khansari, Ali Mostashari and Mo Mansouri	<i>Impacting Sustainable Behaviour and Planning in Smart City</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Littig, B and Grieler, E. (2005). “<i>Social suistainability: a catchword between political pragmatism and social theory,</i>” International Journal of Suistainable Development, vol. 8 (1/2), 63-78 - Naphade et al (2011). <i>Smarter cities and their</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh <i>smart city</i> terhadap keberlanjutan perkotaan yang dipetakan melalui aspek kota cerdas, berbagai aspek tersebut mengidentifikasi kesenjangan yang perlu ditangani untuk memahami sepenuhnya dampak dari <i>smart city</i>. - Ada beberapa aspek keberlanjutan, dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek keberlanjutan yang pertama yaitu keberlanjutan ekonomi, dalam hal ini berkaitan dengan pencapaian tingkat

			<p><i>innovation challenges</i>, Computer, 44 (6), 32-39</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hancke, G. P., and Hancke Jr, G. P. (2012). “<i>The role of advanced sensing in smart cities</i>,” Sensors, vol 13(1), pp. 393-425 - Nam, T. and Pardo, T. A. (2011). “<i>Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions</i>,” presented at the 12th Annual International Conference on Digital Government Research. - Copust, A. K. and Crabtree, J. R. (1996). “<i>Indicators of socio-economic sustainability: an application to remote rural Scotland</i>,” World Development, vol. 12(1), 	<p>sosio-ekonomi, output demografi dan teknologi yang akan memperkuat fondasi sistem urban.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Aspek keberlanjutan yang kedua yakni keberlanjutan sosial yang mengacu pada kesejahteraan lintas generasi, generasi masa kini dan generasi masa depan. c. Aspek keberlanjutan yang ketiga yaitu keberlanjutan ekologi, dimana dalam hal ini berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan pengembangan serta pelestarian alam. d. Aspek keberlanjutan yang keempat yaitu aspek perilaku warga, dimana perilaku manusia seperti overpopulasi dan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan ancaman utama bagi lingkungan. <p>- Dalam prakteknya, warga negara diharuskan paham akan peran penting mereka untuk dapat mengadopsi pola hidup yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi, dimana partisipasi tersebut diperankan oleh semua segmen termasuk partisipasi aktif dari warga agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>- Dengan adanya smart city terjadinya peningkatan perhatian sebagai salah satu pendekatan dalam mengatasi tantangan manajemen perkotaan, dimana didalamnya dengan memiliki informasi yang tepat pada saat yang tepat, warga negara, penyedia</p>
--	--	--	---	--

			41-54 - Caragliu, A. Et al. (2011). “ <i>Comparative performance assesment of smart cities around the North sea Basin,</i> ” Network Industries Quarterly, vol. 13(3)	layanan, dan pemerintahan kota akan mampu membuat keputusan yang lebih baik yang dapat menghasilkan kualitas hidup bagi penduduk perkotaan yang berkesinambungan secara keseluruhan.
6	Marganita Angelidou	<i>Four European Smart City Strategies</i>	- Allwinkle, S., & Cruickshank P. (2011) <i>Creating Smart-er Cities: An Overview.</i> Journal of Urban Technology, 18(2) - Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2009). <i>Smart Cities in Europe.</i> Serie Research Memoranda 0048 - Komninos, N. (2009). <i>Intellegent cities: towards interactive and global innovation environments.</i> International Journal of	- Mengilustrasikan adanya strategi <i>state of play smart</i> yang diterapkan di kota-kota besar di Eropa, yaitu Amsterdam, Barcelona, London, dan Stockholm. - Keberadaan <i>smart city</i> lahir karena teknologi dan masyarakat yang berubah secara dinamis, kota cerdas ini mendefinisikan kembali dirinya kemudian bereksperimen dengan cara berfikir tentang teknologi yang baru dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. - Strategi yang dilakukan oleh empat kota besar di Eropa ini dituangkan ke dalam 4 karakteristik yakni: 1. Peran sentral teknologi; 2. Kemajuan modal, manusia, dan sosial; 3. Kemajuan sektor bisnis; 4. Jaringan (networking). - Hasil temuan empiris di lapangan, <i>smart city</i> pertama yang dipelajari dimulai dari kota Amsterdam, Belanda. Smart city di Amsterdam direalisasikan melalui kemitraan diantaranya melalui sektor bisnis, otoritas, lembaga penelitian, dan masyarakat. Tujuan

			<p>Innovation and Regional Development, I(4), 337-335</p> <p>- Nam, T., & Pardo, T. (2011). <i>Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions</i>. 12th Annual International Conference on Digital Government Research, College Park, MD, USA, 282-291</p>	<p>dari kemitraan ini adalah adanya transformasi metropolitan di Kota Amsterdam menjadi kota pintar yang bebas emisi CO2.</p> <p>- Kedua, Kota Barcelona, Spanyol. Kota ini telah menggunakan teknologi ilmu komputer untuk meningkatkan fungsi perkotaan yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade dengan proyek yang tersebar di berbagai departemen. Kota Barcelona juga memiliki pengalaman yang panjang dalam inisiatif pembuatan <i>living lab</i> dan sedang dalam proses pengembangan strategi kota pintar yang formal.</p> <p>- Ketiga yakni Kota London, London memiliki <i>Smart London Plan</i> yang mana teretus dari keadaan yang pada saat itu menuntut kemajuan perubahan yang signifikan dari Kota London karena adanya pergelaran Olimpiade besar yakni pada akhir tahun 2013. Strategi ini bertujuan mengelola transportasi umum yang dibuat secara digitalisasi.</p> <p>- Keempat adalah Kota Stockholm, Swedia. Kota Stockholm mengembangkan smart city melalui <i>smart living</i> yang mana kota ini telah memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam hal penelitian dan inovasi teknologi lingkungan dan informasi, ia juga memiliki budaya yang telah mapan sebagai kota layak huni yang berkelanjutan yang mana menawarkan standar hidup yang tinggi.</p>
7	Rustem A. Shichiyakh, Denis A. Klyuchnikov, Steven P. Balashova, Sergey N. Novoselov, and	<i>Smart City as the Basic Construct of the Socio-economic Development of Territories</i>	- Glaser, E. (2013), <i>Triumph of the city: As our greatest invention makes us richer,</i>	- Hal mendasar yang menjadi tujuan dari <i>smart city</i> adalah menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas tinggi, yang didikte oleh meningkatnya persaingan investasi. Kemudian untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.

	Natalya N. Novosyolova		<p><i>smarter, greener, healthier and happier.</i> Economic Sociology, 14(4), 75-49</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nikolaev, V. (2015), <i>Smart Cities – The Future Today</i>. Saint Petersburg: Piter - Ribina, E. (2015), <i>Organizational and economic methods for development of smart cities</i>. Economic Systems Management, 82, 27. - Shkurkin, D., Shestopal, S., Gurieva, L., Blagin, V., Gurianov, P. (2016), <i>Basic characteristic of an intensive type of the reproduction process in the regional economy</i>. International review of Management Marketing, 6(1S), 95-100. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat delapan komponen utama mengenai <i>smart city</i> yaitu energi, air, transportasi, keamanan, layanan, integrasi, pemerintah, warga, dan sistem lingkungan. - Kota pintar adalah kota yang menggunakan informasi dan komunikasi teknologi untuk menjadikan penggunaan sumber daya yang lebih cerdas dan lebih efisien yang dapat menghasilkan penghematan biaya dan energi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas hidup serta mendukung inovasi dan perekonomian yang ramah lingkungan. - Investasi besar yang telah dianggarkan untuk teknologi dalam menciptakan smart city di kota-kota dilakukan dengan metode pembayaran berupa kerjasama bisnis sehingga menimbulkan efek sosial yang tinggi yang bersinergi dalam pengembangan bidang lain dalam kehidupan perkotaan, seperti munculnya pelayanan jenis baru, dsb. - Dibalik banyaknya kota-kota besar yang telah sukses dalam menciptakan smart city, ternyata masih ada beberapa kota besar yang usahanya gagal untuk mewujudkan <i>smart city</i> tersebut. - <i>Smart city</i> memiliki dampak negatif dalam keberlangsungan pola hidup masyarakatnya yaitu kemalasan menjadi ancaman yang serius bagi warga masyarakat karena semua telah dipermudah dengan kemajuan teknologi yang telah ada, apabila kemalasan
--	------------------------	--	--	--

				tersebut benar terjadi maka akan rentan diserang berbagai penyakit yang kemudian berdampak dan merugikan diri sendiri serta beresiko terhadap genarasi mendatang.
8	Farnaz Mosannenzadeh and Daniele Vettorato	<i>Defining Smart City A Conceptual Framework Based on Keyword Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, T., Pardo, T. A., 2011. <i>Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions</i>, in: <i>Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times</i>, ACM, pp. 282-291. - Bahr, V., 2013, <i>What Smart Cities can learn from CONCERTO, Summerising the results of the 58 cities and communities co-financed by the CONCERTO initiative.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kerangka konseptual sebagai acuan dalam mendefinisikan kota pintar. - Kota pintar diciptakan bertujuan untuk menangani tantangan, termasuk kelangkaan sumber daya seperti energi, kesehatan, perumahan, air, infrastruktur yang buruk, kurangnya energi, ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan permintaan untuk peluang ekonomi & sosial yang lebih baik. Kota pintar muncul terutama karena interaksi antara daya saing dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. - Komponen dalam kota pintar adalah ekonomi, lingkungan, masyarakat, pemerintah, mobilitas, dan pembangunan. Kemudian aktor utama dalam penciptaan kota cerdas yakni semua elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, pihak swasta, investor, dll. - Peran sentral infrastruktur dan layanan berbasis ICT sebagai komponen utama terciptanya <i>smart city</i>. - Setiap kota dapat menjadi <i>smart city</i>, banyak faktor yang dapat mempercepat atau menghambat “peningkatan keberlanjutan” ini dan tidak ada batasan mutlak terhadap implementasi <i>smart city</i>.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kanter, R., M. & Litow, S. S., 2009. <i>Informed and Interconnected: a manifesto for smarter cities</i>, working paper. - Washburn, D., Sindhu, U., 2009. <i>Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives</i>. Growth. 	
9	Tewoo Nam and Theresa A. Pardo	<i>Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Holand, R. G (2008). <i>Will the real smart city please stand up?</i> City, 12(3), 303-320 - Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmed, N. (2009a). <i>Smart city components architecture</i>. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9) 	<p>- Inisiatif adanya <i>smart city</i> muncul sebagai model untuk memperbaiki masalah perkotaan yang ada saat ini dan menjadikan kota sebagai tempat hidup yang lebih baik. Pada prinsipnya strategi <i>smart city</i> tersebut diselaraskan ke dalam tiga dimensi utama yaitu dimensi teknologi, orang, dan institusi. Kota pintar; integrasi infrastruktur dan layanan yang dimediasi teknologi, pembelajaran sosial untuk memperkuat infrastruktur manusia, dan tata kelola untuk peningkatan kelembagaan dan keterlibatan warga negara.</p> <p>1. Dimensi teknologi, melalui teknologi digital dan infrastruktur menghubungkan organisasi, kelompok sosial, dan perusahaan yang berada di perkotaan. Label kota cerdas biasanya digunakan untuk kota yang memiliki kemampuan dalam mendukung pembelajaran, pengembangan teknologi, dan prosedur inovasi, kota digital belum tentu cerdas, tapi setiap</p>

			<p>- Washburn, D., Sindhu, U., 2009. <i>Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives</i>. Growth.</p>	<p>kota cerdas memiliki komponen digital.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dimensi manusia, kota pintar adalah kota yang manusiawi yang memiliki banyak peluang dalam memanfaatkan potensi manusianya dan menjalani kehidupan yang kreatif. Kota pintar adalah pusatnya pendidikan tinggi dan individu yang berpendidikan lebih tinggi. 3. Dimensi kelembagaan, menguraikan konsep “sebuah komunitas di mana pemerintah, bisnis, dan penghuni (masyarakat) memahami potensi teknologi informasi, dan membuat kesadaran untuk dapat menggunakan teknologi sebagai salah satu komponen yang dapat mengubah kehidupan secara positif. <p>- Pandangan sosio-teknis yang ada di kota pintar sangat dibutuhkan, dimana faktor sosial selain teknologi menjadi pusat dari kecerdasan kota, dengan konsep yang bisa disebut koneksi organik di antara teknologi, manusia, dan kelembagaan telah menjadi pendorong agar keluarnya ide-ide inovatif dan perubahan transformatif yang didorong oleh teknologi baru.</p>
--	--	--	---	---

